



SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
BPK SUMBAR

2 0 1 9

KORAN	HAL
Haluan	1 & 7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jangan Bawa Tidur SPj Fiktif

PADANG, HALUAN – Delapan bulan pascavonis sembilan tahun untuk Yusafni Ajo selaku terpidana korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) Fiktif di lingkungan Dinas Prasarantarkim (sekarang Dinas PUPR) Provinsi Sumbar, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar (KMSAK) Sumbar kembali mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melanjutkan penyidikan atas

PENANGANAN kasus terkesan lamban. Padahal kasusnya jelas, terpidananya sudah ada, informasinya sudah banyak, tetapi penegak hukum belum juga menindaklanjuti secara lebih konkrit

(M. ISA GAUTAMA-PK GEBRAK)

keterlibatan pihak lain dalam tindakan korup kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp62,5 miliar itu.
Koordinator Lembaga Anti Ko-

rupsi Integritas, Arief Paderi, kepada *Haluan* menegaskan, pihaknya mendesak APH, terutama penyidik

>> "JANGAN hal 07



KORAN	HAL
Haluan	187
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"Jangan Dari Halaman. 1

dari Subdit Dit IV Tipidkod Mabes Polri yang sebelumnya menangani kasus ini, untuk melanjutkan penanganan atas kasus SPj Fiktif, yang dipastikan terbukti setelah satu orang terdakwa divonis bersalah.

"Kami mendesak penyidik karena masyarakat menunggu kelanjutan dari pengusutan kasus ini hingga tuntas. Patut diingat, ini adalah kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah di Sumbar. Karena ini kasus korupsi, tentu tidak mungkin menyeret satu-dua orang saja," kata Arief, Minggu (13/1).

Lambannya penanganan lanjutan atas kasus SPj Fiktif yang masuk Jilid II ini, sebut Arief, seolah-olah mengesankan tindakan korup tersebut hanya dilakukan oleh dua pelaku saja, yakni Yusafni yang telah divonis bersalah, dan Suprpto, mantan Kepala Dinas Prasarana dan Transportasi Sumbar yang dalam dakwaan jaksa untuk kasus Yusafni disebut ikut terlibat dalam menyelewengkan anggaran negara dengan motif SPj Fiktif tersebut.

"Saat ini terkesan yang terlibat cuma dua orang itu saja. Padahal dalam proses pembuktian (persidangan) banyak pihak-pihak lain yang disebut terlibat oleh Yusafni. Boleh dikatakan saat persidangan itu, Yusafni menyebutkan banyak nama, termasuk yang menerima aliran dana dan terlibat dalam aktivitas pencucian uangnya. Siapa yang menerima dan menikmati uang hasil dari kejahatan itu harus diungkap satu-satu," kata Arief lagi.

Selain itu, Ketua Lembaga Pusat Kajian (PK) Gebrak Universitas Negeri Padang (UNP), Mohammad Isa Gautama, ikut mendesak agar penegak hukum untuk melanjutkan penanganan kasus korupsi yang terkesan seolah diperlambat. Padahal, katanya, sudah ada pihak-pihak yang secara terang disebutkan dalam persidangan, dan sangat besar kemungkinannya terlibat dalam kasus SPj Fiktif.

"Kasus ini terkesan lambat penanganannya. Padahal kasusnya jelas, terpidananya sudah ada, informasinya sudah banyak, tetapi hukum belum juga

menindaklanjuti secara lebih konkrit," katanya Isa.

Isa Gautama juga menyakini, kasus korupsi dengan kerugian puluhan miliar dan menyentak publik tersebut tidak hanya melibatkan Yusafni dan Suprpto saja. Namun, pasti ada pelaku lain yang terlibat, sebagaimana namanya yang telah dikicaukan Yusafni dalam pemeriksaannya di persidangan.

"Kami meyakini banyak pihak yang terlibat. Untuk itu kami sangat berharap penegak hukum mengusut kembali hingga ke akarnya. Tidak berhenti di sana saja," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Lembaga Hukum dan Anti Korupsi (Luhak) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Sumbar (UMSB), Wendra Yunalidi. Bahkan menurutnya, penyidik harus mengejar siapa betul pelaku/aktor utama dalam kasus tersebut. Menurut Wendra, Yusafni yang saat ini menjadi terpidana bukanlah aktor utama.

"Itu dapat dilihat dari posisinya sebagai pegawai biasa di Dinas Prasarana dan Transportasi Sumbar. Sangat mustahil rasanya kalau hanya Yusafni, lagi pula korupsi itu tidak mungkin dilakukan satu orang saja. Dalam persidangan itu, sudah disebutkan nama-nama penerima aliran uang tersebut. Sekarang bagaimana penyidik mengejar para pelaku utama dan pelaku lainnya itu," kata Wendra.

Hingga berita ini diturunkan, Haluan masih berupaya mencari tahu perkembangan pengusutan kasus SPj Fiktif Jilid II dari Dit IV Tipidkor Mabes Polri. Namun, hingga saat ini Haluan belum berhasil mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan pengusutan oleh penyidik. Beberapa kali usaha telfon dan pesan singkat yang dilakukan belum membuahkan hasil.

Perkembangan Terakhir

Kasus SPj fiktif yang kini ditangani Bareskrim merupakan jilid dua. Untuk jilid pertamanya, sudah tuntas, dimana Yusafni Ajo, pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah divonis sembilan tahun penjara oleh majelis hakim Penga-

dilan Tipikor Padang. Khusus jilid II, penyidik sedang mengejar orang-orang yang diduga terlibat dan kecipratan uang korupsi yang menurut hitungan auditor BPK mencapai Rp62,5 miliar.

Akan tetapi, proses penyelidikan tersendat dan mangkrak di Bareskrim Polri. Karena polisi adanya kasus prioritas yang mesti didahulukan. Bareskrim tahun 2018 lalu berkosentrasi untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi PT Pertamina EP Cepu, Blok Alas Dara Kemuning, yang menyeret PT PEPC ADK, dengan kerugian negara mencapai Rp178 miliar, di mana kasusnya telah sampai pada tahap penyidikan.

"Untuk kasus SPj fiktif yang terjadi di Sumbar, tim masih terus mendalaminya dengan mengumpulkan keterangan dan bukti. Namun, memang sekarang fokusnya menyelesaikan kasus lain. Kosentrasi tahun ini agak terbagi ke kasus PT PEPC ADK yang telah masuk tahap penyidikan. Meski demikian, bukan berarti kasusnya (SPj) fiktif diabaikan," ucap Kepala Subdit IV Tipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto, kepada Haluan beberapa waktu lalu.

Totok menjelaskan, tahun 2018 lalu pihaknya menangi empat kasus, salah satunya kasus PT PEPC ADK. Setelah menyelesaikan kasus-kasus tersebut, pihaknya akan kembali berkonsentrasi penuh untuk membongkar keterlibatan pihak lain pada kasus SPj Fiktif yang masih dalam tahap penyelidikan. "Semoga tahun ini empat kasus yang sedang kami tangani selesai, dan tahun depan pendalaman untuk SPj fiktif jilid II disebut. Kasus ini tidak berhenti pada jilid I dengan tersangka Yusafni saja. Keterlibatan pihak lain tentu ada. Mohon terus dukungannya. Kami jaga komitmen untuk ini," kata Totok lagi saat itu.

Sementara itu Penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri, AKBP Rahmat sebelumnya memastikan, dugaan aliran uang ke banyak pihak bukan sekadar ocehan Yusafni saja. Dalam pengembangan kasus, Bareskrim juga menemukan praktik tersebut. (h/mg-hen)